

ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Subadriyah

Solikhul Hidayat

Universitas Nahdlatul Ulama Jepara

subadriyah@unisnu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of PAD and DAU on Regional Expenditure as well as to determine whether there a flypaper effect on the Districts / Cities in Central Java Province. This research is a quantitative research with population of 35 districts / cities located in Central Java province. The sampling technique is by census method. The method of analysis used is multiple regression analysis. Secondary data is taken from the Realization Report of Regional Income and Expenditure Budget in 2015. The result shows that PAD and DAU partially have significant effect to local expenditure and flypaper effect has occurred in Districts/City in Central Java Province. This means that the district / cities governments in Central Java are still dependent on the central government in terms of financing local spending.

Keywords: PAD, DAU, Flypaper Effect

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional yang berdasarkan pada otonomi daerah. Otonomi daerah ini diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah, sehingga daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Namun, pada praktiknya pemerintah daerah dalam membiayai operasi utamanya sehari-hari bergantung pada dana transfer pemerintah, yang dalam hal ini akan menimbulkan fenomena *flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak mengandalkan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri

dari DAU dan DAK, dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri

yang berasal dari PAD (Rokhaniyah, 2011). Peristiwa *flypaper effect* ini akan membawa implikasi yang lebih luas bahwa transfer dapat meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan transfer dana dari pemerintah pusat. *Flypaper effect* ini terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat.

Sumber keuangan terdiri dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber non Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat tercapai apabila sumber keuangan daerah dapat membiayai aktifitas daerah yang berasal dari PAD (Rokhaniyah, 2011). PAD merupakan indikator kemandirian suatu daerah oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada

jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan.

Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Kekurangan atas belanja daerah dari PAD yang diperoleh dapat diatasi dengan transfer antar pemerintah. Salah satu transfer dari pemerintah pusat dapat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). DAU bisa disebut dengan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Junaidi (2012:47) membuktikan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia terlalu responsif atas kenaikan DAU, dibandingkan kenaikan PAD terutama dari pajak daerah. Pemerintah daerah selaku penerima DAU bereaksi secara asimetri atas peningkatan nilai DAU yang diterima. Bila DAU meningkat dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU.

Transfer pemerintah akan berakibat pada ketergantungan pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pemerintah daerah akan menggantungkan alokasi dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang ada di daerah (Wulansari, 2015). Di saat transfer Dana Alokasi Umum yang diperoleh sangat besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect*. Hal ini Apriliawati dan Handayani (2016) melakukan penelitian mengenai terjadinya *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *flypaper effect* telah terjadi pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Paramartha dan Ayu (2016) melakukan penelitian yang sama terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil yang diperoleh bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Demikian halnya Sasana (2010) membuktikan bahwa adanya *flypaper effect* karena belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU daripada PAD.

Hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lainnya atau seluruh wilayah Indonesia karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi geografis, kondisi ekonomi, maupun kehidupan masyarakatnya. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk melengkapi hasil penelitian tersebut dengan melakukan penelitian pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah mengenai pengaruh PAD, DAU terhadap belanja daerah. Tahun pengamatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu tahun 2015. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH

Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber PAD terdiri di antaranya yaitu Pajak serta Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisah, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu daerah dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas kemandirian suatu daerah. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Rahmawati dan Suryono (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang memiliki peningkatan dalam jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja yang dikeluarkan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum, DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan daerah-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi serta desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2009).

DAU diberikan sebagai sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar

daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan atas kebutuhan dan potensi yang ada daerahnya. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang belum mampu memaksimalkan pendapatan pribadinya dimana daerah tersebut masih memiliki kapasitas fiskal yang cukup rendah. Semakin besar dana yang diterima maka menandakan bahwa daerah tersebut belum siap menjadi daerah otonom. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2010); (Apriliawati dan Handayani, 2016); dan (Amalia, 2015) yang memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini berarti bahwa DAU yang tinggi akan menyebabkan belanja daerah semakin meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

FLYPAPER EFFECT

Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Hastuti (2011) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indifferensiasi. Transfer bersyarat (*conditional grants*) mempengaruhi konsumsi barang privat dengan melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya dengan transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), dengan demikian akan menurunkan harga barang publik. Dalam lingkup ini, pemerintah memberikan subsidi kepada setiap unit barang publik. Bagaimana Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Jika, harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat serta apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Dengan adanya hal itu, maka kenaikan transfer sebagian akan

berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi berakibat pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

Flypaper effect ini merupakan kondisi dimana komposisi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari dana transfer daripada dana pribadinya. Peristiwa *flypaper effect* membawa dampak lebih luas dan beranggapan bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua hal. Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah (Hastuti, 2011).

Besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah. Berdasarkan model prediksi belanja daerah, daya prediksi Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding dengan daya prediksi PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliawati dan Handayani, 2016); (Iskandar, 2015). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang berada di propinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan metode sensus. Sehingga total sampel

dalam penelitian ini yaitu 35 kabupaten/kota yang berada di propinsi Jawa Tengah. Data sekunder yang diambil berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data tersebut berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data tersebut berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah serta data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2015. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten atau kota di Jawa Tengah.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Model analisis ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja daerah (BD), sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut. Adapun persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

β_0 = *Intercep* (titik potong antar garis regresi)

β_1 = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah

β_2 = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

e = Variabel Pengganggu

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data yang berdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinieritas, bebas heteroskedastisitas, dan bebas autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah pada tahun 2015. Langkah awal pengujian atas data yang telah terkumpul dilakukan pengujian statistic deskriptif.

Statistic deskriptif ini memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistic deskriptif dalam hal ini menggambarkan variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan independen. Deskriptif suatu data tersebut dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel. Hasil statistic deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	105918010,0	1052732041	226421725,8	155213964,6
DAU	35	400176755,0	1332536848	887706934,7	237556485,7
BD	35	781867908,0	3654580506	1778139058	537227398,8
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 105.918.010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dengan nilai terendah diperoleh di Kota Salatiga. Hal

ini membuktikan bahwa Kota Salatiga masih sangat bergantung dengan Pemerintah Pusat dalam membiayai belanja daerahnya. Kota Salatiga harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan dan lain-lain dari PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dengan nilai maksimum sebesar Rp. 1.052.732.041 diperoleh dari Kota Semarang. Hal ini terbukti bahwa Kota Semarang mampu mandiri dan mampu mengoptimalkan PADnya. Tingginya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Kota Semarang dialokasikan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 226.421.725,8 dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 155.213.964,6.

Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp. 400.176.755. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dengan nilai terendah di Jawa Tengah di peroleh dari Kota Salatiga. Hal ini membuktikan bahwa kota Salatiga dapat mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya tanpa menggantungkan dana dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum dengan nilai maksimum sebesar Rp. 1.332.536.848 diperoleh di Kabupaten Cilacap. Hal ini terbukti bahwa ketergantungan Kabupaten Cilacap atas transfer dari pemerintah pusat sangat besar. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 887.706.934,7 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 237.556.485,7.

Belanja pemerintah kabupaten atau kota diklasifikasikan berdasarkan ekonomi, organisasi dan juga fungsi. Berdasarkan data yang diolah tahun 2015, Belanja Daerah memiliki nilai

minimum sebesar Rp. 781.867.908 ada di Kota Magelang dan belanja daerah dengan nilai maksimum sebesar Rp. 3.654.580.506 ada di Kota Semarang. Selain dari PAD, Kota Semarang dalam membiayai belanja daerahnya berasal dari pendapatan lain selain dari PAD dan DAU. Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 1.778.139.058 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 537.227.398,8.

Hasil analisa statistik deskriptif diatas terlihat bahwa setiap daerah memiliki kemampuan dalam menghasilkan pendapatan pribadi dan kemampuan belanja daerah yang berbeda-beda. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan nilai belanja daerah tertinggi yang terpaut jauh dari belanja daerah terendah.

Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Namun, apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ maka dikatakan data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	0,853	Normal

Sumber: Data yang diolah (2017)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa model regresi berdistribusi normal dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dan diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar

0,853. Nilai tersebut dapat dilihat dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Sedangkan untuk uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	.887	1.127
DAU	.887	1.127

Sumber: Data yang diolah(2017)

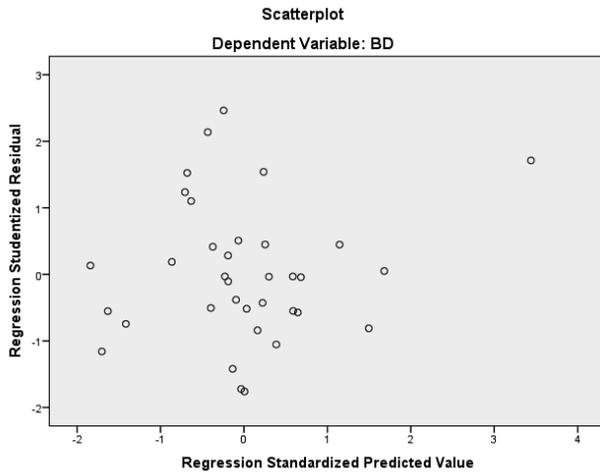
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kedua variabel yaitu PAD dan DAU masing-masing sebesar 1.127 dan nilai *Tolerance* masing-masing variabel sebesar 0.887. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* kurang dari 0.1. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Pengujian selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji grafik *scatterplot*. Kriteria pengambilan keputusannya apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang lalu menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas.

Berikut merupakan hasil dari uji Heteroskedastisitas:

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data yang diolah (2017)

Hasil pengujian menggunakan Grafik *Scatterplot* diperoleh hasil bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Pengujian terakhir yaitu uji autokorelasi yang dilakukan untuk menguji dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Uji	Hasil
Durbin Watson	1.892

Sumber: Data yang diolah (2017)

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan sebesar 1.892. Berdasarkan asumsi ketentuan diatas nilai D-W yang dihasilkan berada diantara -2 sampai +2 yang berarti bahwa data yang diuji tidak mengandung atau bebas autokorelasi.

Berdasarkan pengujian asumsi klasik diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat asumsi klasik atau dapat dikatakan lolos dari uji asumsi klasik. Maka uji selanjutnya yaitu uji regresi dengan menggunakan program SPSS 20. Adapun hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis Dat

Variabel	Unstandardized Coefficients	T	Sig
Constant	-13572736,83		
PAD	1.755	17.424	0.000
DAU	1,571	23.863	0.000

Sumber: Data yang diolah (2017)

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = -13572736,83 + 1.755 \text{ PAD} + 1.571 \text{ DAU} + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai *unstandardized coefficients* β sebesar 1.755, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang searah antara PAD dengan belanja daerah, yang artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada PAD sebesar 1 satuan, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.755, dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai *unstandardized coefficients* β sebesar 1,571, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang searah antara DAU dengan belanja daerah, yang

artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada DAU sebesar 1 satuan, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,571, dengan asumsi variabel lain konstan.

Selanjutnya yaitu pengujian koefisien determinasi. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *adjusted R square*. Alasan digunakannya pengukuran dengan *adjusted R square* ini karena nilai *adjusted R square* dapat naik atau turun apabila ditambahkan satu variabel independen ke dalam model. Berikut merupakan tabel hasil analisis koefisien determinasi.

Tabel 6
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

	Nilai
R	0.988
<i>R Square</i>	0.976
<i>Adjusted R Square</i>	0.974

Sumber: Data yang diolah (2017)

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 diatas. Berdasarkan tabel diatas koefisien determinasi model regresi diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0.974. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) mampu menjelaskan perubahan variabel dependen Belanja Daerah sebesar 97,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai *adjusted R square* tersebut tergolong cukup tinggi karena variabel independen tersebut merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi berganda dengan uji statistik t menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tabel 5 diatas, nilai t dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17.424 dengan tingkat signifikansi 0.000 (< 0.05).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin meningkat. Jumlah PAD akan mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya yaitu dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah pada pelayanan kepada masyarakat lapisan bawah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber kekayaan yang berada pada wilayah daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan daerah. Untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan infrastruktur yang memadai sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang berada diwilayahnya agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PAD yang dihasilkan oleh masing-masing daerah di propinsi Jawa Tengah berbeda-beda sesuai dengan keunggulan daerah tersebut, kemampuan dalam menghasilkan pendapatan pribadinya, luas daerah dan kebutuhan fiskal yang dimiliki. PAD memiliki peranan yang penting dalam hal pembangunan daerah. PAD harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya agar pemerintah daerah dapat membiayai sebagian dari belanja daerahnya, sehingga tingkat kemandirian otonomi daerahnya dapat dilaksanakan (Amalia, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012); Sasana (2010); Apriliawati dan Handayani (2016) yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah masih sangat diandalkan dalam pembiayaan belanja modal. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan, maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan semakin banyak sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Dalam hal ini tingkat kemandirian pemerintah daerah akan semakin tinggi.

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai t sebesar 23.863 dengan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sehingga setiap Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Suatu daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil maka Dana Alokasi Umum yang diterimanya akan relatif kecil. Begitupun sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar maka Dana Alokasi Umum yang diterimanya akan relatif besar. Secara implisit prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Dana Alokasi Umum pada dasarnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan desentralisasi serta mengatasi adanya kesenjangan fiskal. Pemberian DAU

ini didasarkan atas kemampuan fiskal masing-masing daerah (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2010); Apriliawati dan Handayani (2016); Amalia (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dalam hal ini untuk mendanai kebutuhan daerahnya. Sehingga pada dasarnya pemberian Dana Alokasi Umum ini sebagai “alat pancing” untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan bantuan transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional daerah dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuan dari dana alokasi umum ini adalah pemerataan kemampuan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat. Dana Alokasi Umum sumber dana yang dominan serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah guna membiayai kebutuhan daerah.

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *Flypaper Effect* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien Dana Alokasi Umum dengan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan kriteria terjadinya *flypaper effect* yaitu (1) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada efek PAD atau keduanya sama-sama signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan. Berdasarkan hasil

penelitian diatas dapat diketahui bahwa nilai t variabel DAU lebih besar dari pada nilai t variabel PAD, dimana nilai t PAD sebesar 17.424 sedangkan nilai t DAU sebesar 23.863 dan kedua variabel tersebut sama-sama signifikan. Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi *Flypaper Effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Sasana (2010); Apriliawati (2016); Paramartha dan Ayu (2016) yang menyatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah.

Flypaper Effect merupakan komposisi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum daripada menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah. Terjadinya *Flypaper Effect* ini karena peranan Pendapatan Asli Daerah yang masih relatif rendah atau kecil dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum dan basis pajak yang masih rendah karena pembangunan ekonomi yang belum seimbang. Selain itu elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap transfer lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas pengeluaran penerimaan pajak daerah. Sehingga, dalam hal ini membawa implikasi bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah dari pada penerimaan transfer itu sendiri.

Flypaper dipandang sebagai suatu anomaly dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai pendapatan masyarakat (seperti pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan dengan cara yang sama pula. Kondisi *Flypaper Effect* tersebut merupakan sebuah hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah

karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat. Sementara, hal utama yang diinginkan setiap daerah adalah menciptakan kemandirian daerah tanpa bergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini akan menyebabkan kegagalan dalam otonomi daerah (Sasana, 2010).

Adanya peristiwa *flypaper* ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa mandiri dalam mengelola daerahnya. Mereka merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer sehingga dalam hal ini akan mengakibatkan pemborosan belanja daerah. Pemerintah daerah akan terus bergantung pada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan dana transfer tanpa memanfaatkan potensi daerah yang mereka miliki. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kecenderungan belanja pemerintah daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan perilaku manusia. Perilaku manusia ini dianggap sebagai aktivitas fisik seseorang terhadap orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan diri ataupun orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ini yaitu antara lain adanya kebutuhan, motivasi permintaan organisasional dan faktor-faktor yang lainnya.

Perilaku manusia ini tidak terjadi secara sporadis (timbul dan hilang pada saat tertentu) melainkan selalu ada kelangsungan kontinuitas antara satu perbuatan dengan perbuatan yang berikutnya. Perilaku ini tidak berhenti pada suatu saat. Perbuatan yang dulu merupakan persiapan perbuatan di kemudian hari dan perbuatan yang kemudian ini merupakan kelanjutan dari perbuatan sebelumnya. Sehingga sekali pemerintah daerah menerima bantuan transfer dari pemerintah pusat maka akan memiliki kecenderungan untuk selalu

mengandalkan bantuan dikemudian hari dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.

Pemerintah pusat terkadang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan kesempatan yang ada tanpa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah agar pemerintah pusat bersedia memberikan transfer berupa DAU dalam jumlah yang besar. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya kemandirian daerah dikemudian hari.

Pemerintah daerah yang menjadi pengusul anggaran dan pelaksana anggaran akan berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran. Sehingga dalam hal ini dapat terjadi manipulasi mengenai jenis belanja daerah. Berdasarkan teori ekonomi dan *common sense* menunjukkan bahwa jenis belanja daerah dapat membuka peluang untuk *lucrative opportunities*. Misal isu-isu penting dalam pengalokasian sumber daya ke dalam belanja public yaitu adanya pemilihan barang atau pelayanan untuk program yang sulit untuk dimonitor orang lain (Abdullah, 2012). Berdasarkan penelitian Sujaie (2013) mengungkapkan bahwa praktik oportunistik eksekutif dalam kebijakan anggaran terjadi karena dua faktor yaitu pertama, anggapan bahwa eksekutif adalah pelaksana dari semua fungsi pemerintah daerah yang telah berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu yang lama; kedua, eksekutif memiliki akses informasi yang besar dalam konteks penyusunan anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, simpulan yang dapat diambil yaitu: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi

Pendapatan Asli Daerah yang maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin meningkat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat. Telah terjadi *Flypaper Effect* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal membiayai belanja daerah. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah disebabkan oleh rendahnya penerimaan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PAD perlu dilakukan dengan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah. Mengingat pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling besar.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

- a. Bagi pemerintah daerah diharapkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan PAD dari sektor pajak daerah. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya; Bukti Empiris dari

- Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- Amalia, F. 2015. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 11, No.1, hlm 15-25.
- Apriliawati, K. N., & Handayani, N. 2016. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–16.
- Iskandar, I. 2012. *Flypaper Effect* pada *Unconditional Grant*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 13, No. 1, hlm 113-131.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Bogor: Salemba Empat.
- Hastuti, Indhi. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Pada Kota Dan Kabupaten Semarang)". Tesis (tidak dipublikasikan). Semarang : Magister Akuntansi Undip.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Paramartha dan Ayu, N. B. 2016. Analisis *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus pada Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 15 No 2, hlm 1536-1564..
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. 2015. Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(9), 1–20.
- Rokhaniyah, S., dan Muh Rudi N. 2011. Analisis *Flypaper Efect* Pada Belanja Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Tahun 2006-2008. *Fokus Ekonomi* , Vol. 10, No. 2 ISSN 1412-3851, hlm 100-113.
- Sasana, H. 2010. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Terhadap Provinsi Di Indonesia. *Eko- Regional*, Vol. 5, No. 2.
- Sujaie, A.F. 2013. Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran dalam Penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013: Fenomena dalam Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos. *E-Journal UGM*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Wulansari, D. T. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.